SKRIPSI

DAMPAK TANAH TERLANTAR TERHADAP POTENSI KERUGIAN EKONOMI PADA SEKTOR PERTANIAN DI PULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Diajukan Sebagai Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota (S.PWK) Pada Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Mataram

Disusun Oleh :

Nia Kurniati

NIM. 418130053

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

TUGAS AKHIR/SKRIPSI

DAMPAK TANAH TERLANTAR TERHADAP POTENSI KERUGIAN EKONOMI PADA SEKTOR PERTANIAN DIPULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Disusun Oleh:

NIA KURNIATI
418130053

Mataram, 28 Juni 2022

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Baiq Harly Widayanti, ST.,MM	**Febrita Susanti, ST.,M.Eng**

Mengetahui,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Dekan,

Dr.Eng. M. Islamy Rusyda. ST.,MT.
NIDN. 0824017501

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

TUGAS AKHIR/SKRIPSI

DAMPAK TANAH TERLANTAR TERHADAP POTENSI KERUGIAN EKONOMI PADA SEKTOR PERTANIAN DIPULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Disusun Oleh:

NIA KURNIATI
418130053

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada hari Rabu 23 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Penguji I : Baiq Harly Widayanti, ST.,MM _____

Penguji II : Febrita Susanti, ST.,M.Eng _____

Penguji III : Fariz Primadi Hirsan ST.,MT _____

Mengetahui,
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS TEKNIK

Dekan,

Dr.Eng. M. Islamy Rusyda. ST.,MT
NIDN. 0824017501

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Kurniati

NIM : 418130053

Alamat : Mataram

Bahwa skripsi yang berjudul **"DAMPAK TANAH TERLANTAR TERHADAP POTENSI KERUGIAN EKONOMI PADA SEKTOR PERTANIAN DIPULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT (NTB) ".** Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka Gelar S.PWK yang saya sandang, dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggungjawab.

Mataram, 28 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Nia Kurniati

488130053

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Kurniati
NIM : 418130053
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 05 Agustus 2000
Program Studi : Perencanaan wilayah dan kota
Fakultas : Teknik
No. Hp : 082 341 489 032
Email : niakurniatibima2018 @gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

DAMPAK TANAH TERLANTAR TERHADAP POTENSI KERUGIAN EKONOMI PADA SEKTOR PERTANIAN DIPULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT (NTB)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 Agustus 2022
Penulis

NIA KURNIATI
NIM. 418130053

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Kurniati
NIM : 418130053
Tempat/Tgl Lahir : Bima, 05 Agustus 2000
Program Studi : Perencanaan wilayah dan kota
Fakultas : Teknik
No. Hp/Email : 082 341 489 032 / niakurniatibima2018@gmail.com
Jenis Penelitian : ☑ Skripsi ☐ KTI ☐ Tesis ☐ .....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Dampak Tanah Terlantar Terhadap potensi kerugian Ekonomi pada Sektor pertanian di pulau Lombok (NTB)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 Agustus 2022
Penulis

NIA KURNIATI
NIM. 418130053

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

Banyak hal yang bisa dicapai, tidak ada proses yang sia-sia yang ada usaha kita yang masih kurang, jalani apa yang bisa dijalani sebab jika kita terlalu menaruh ekspetasi lebih terhadap orang lain sama halnya kita memberi luka untuk diri kita sendiRI, cinta yang utama yaitu mencintai diri sendiri.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Bismillahirahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Akhamdulillahirobbil'alamin. Puju syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan petunjuknya sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan hasil perjuangan yang memelahkan, teriring dengan waktu, kesabaran, ketekunan dan do'a serta wujud kasih saying tak terkira, skripsi yang berjudul **DAMPAK TANAH TERLANTAR TERHADAP POTENSI KERUGIAN EKONOMI PADA SEKTOR PERTANIAN DIPULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT (NTB)** ini saya persembahkan pihak-pihak yang selalu membantu disegala kondisi, ucapan terimakasih tak terhingga ini kepada :

1. Allah AWT yang membrikan nikmat tanpa batas dan tauladan terhebat Nabi Muhammad SAW, yang merupakan Mu'robbi terbesar dalam hidupku.
2. Rasa hormat dan terimaksih yang tak terhingga kepada ayahanda (Nasruddin H.Akarim) dan ibunda (Maemunah) yng tidak pernah merasa lelah memberikan doa, kasih sayang, pengertian, dorongan semangat, materi, support, dan bimbingan untukku.
3. Rasa hormat dan Terimakasih kepada kedua dosen pembimbing skripsi Ibu Baiq Harly Widayanti, ST.,MM dan Ibu Febrita Susanti, ST.,M.Eng yang telah mengarahkan dan sabar dalam membimbing.
4. Terimakasi kepada Bapak Agus Kurniawan, SIP.,M.Eng selaku pembimbing akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan dan masukan dalam keberlangsungan perkuliahan.
5. Terimakasih tak terhingga kepada seluruh Civitas Akademik Sefakultas Teknik UMMAT khususnya dosen PWK UMMAT yang sudah mendidik dan berbagi ilmu.
6. Terimakasih untuk keluarga tercinta, Nurinayah, Muju, Uswatun dan para persepupuan.

7. Terimakasih untuk teman-teman dekat yang selalu membantu, Atiyah, Uzul, Ririn, July, Rama, Izal, Arin, Uma, Azis, Arian Saputra, Tuty, Fitry, Dwi j, Dwi, Ria, Dinda, 6 Pejuang Bangsa, Kontrakan Aye-aye, Adi, Ardiansyah, Esa, dan semua teman-teman seangkatan PWK 18 serta para senior sipil dan PWK (khusunyta k nilam yang gesit buat dimintain tolong).
8. Terimaksih pada Lembaga BEM tercinta yang sudah banyak mengajarkan arti organisasi dan kekeluargaan.
9. Untuk Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram terimakasih karena telah mnjadikan kampus ku tempat menuntut ilmu sebagai bekal di masa depan.

Dan seluruh pihak yang membantu yang belum mampu disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namu penulis berharap dapat diapresiasi dengan baik. Terimakasih, Wasalamualaiku Warohmatullahi Wabarokatuh.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tuntunan serta rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**DAMPAK TANAH TERLANTAR TERHADAP POTENSI KERUGIAN EKONOMI PADA SEKTOR PERTANIAN DI PULAU LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT (NTB)"**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesikan Program Sarjana (S1) Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran beberapa pihak yang telah member dorongan bimbingan dan pengarahan. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati penulis menympaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Asyad Abd. Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. Eng. M. Islamy Rosida , ST.,MT, Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas MuhamadiyahMataram.
3. Ibu FebritaSusanti, ST., M. Eng, selakuKapala Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhamadiyah Mataram.
4. Ibu Baiq Harly Widayanti, ST., MM, selaku dosen pembimbing I skripsi, atas segala arahan dan bimbingan yang di berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu FebritaSusanti, ST., M. Eng, selaku dosen pembimbing II skripsi, atas segala arahan dan bimbingan yang di berikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Semua dosen yang telah mendidik penulis dari semester awal hingga akhir
7. Kedua orang tua ku yang selalu saya banggakan serta keluarga besar yang selalu menjadi motvator utama dan selalu mendoakan, memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna baik bagi segi sisi mauoun penulis. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dengan ikhlas dari semua pihak demi menyempurnakan ke tahap selanjutnya.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Mataram, 18 Juli 2022

Nia Kurniati
NIM. 418130053

ABSTRAK

Tanah bila dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya serta faktor yang mempengaruhi pengembangan tanah akan memberikan kontribusi bagi daerah serta dapat memberi nilai lebih bagi suatu kawasan jika pengunaannya dapat dikelola dengan baik. Hal ini juga dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). NTB merupakan salah satu kawasan teratas dari 20 Provinsi di Indonesia yang presentase luasan tanah terindikasi telantar terhadap luas tanah perkebunan sebanyak 10,6% dengan beberapa faktor penelantaran lahan yang kompleks. Penelantaran akan tanah ini jika dibiarkan terus menerus akan memberikan dampak negatif salah satunya yaitu kerugian ekonomi. Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data identifikasi lapangan, wawancara, dokumentasi dan kajian literatur. Setelah melakukan analisis dari data-data terkait penelitian, maka didapatkan kesimpulan umum bahwa adanya tanah terindikasi terlantar di tiga (3) kabupaten yang ada dipulau lombok antaranya kabupaten Lombok Timur dengan tingkat penelantaran tanah 22 tahun lamanya dan Lombok Tengah dengan tingkat penelantaran tanah 23 tahun lamanya serta Lombok Utara dengan tingkat penelantaran tanah 28 tahun lamanya, hal ini berdasarkan perhitungan estimasi kerugian sektor perkebunan terhadap tanah terindikasi terlantar menunjukan adanya pengaruh pada tingkat kerugian produksi perkebunan dan tenaga kerja perkebunan terhadap tanah terindikasi terlantar jika tanah tersebut terus dibiarkan tanpa adanya pengelolaan atau pemanfaatan diatasnya. Sedangkan faktor utama penelantaran tanah ini disebabkan oleh adanya konflik antar pihak dan minimnya infrastruktur pendukung pada wilayah sekitar kawasan tersebut.

Kata Kunci : Faktor, Kerugian Ekonomi, Perkebunan, Terlantar

ABSTRACT

A region will benefit if the land is used effectively under its designation and variables impacting land development. If its use is properly controlled, it can add value to a location. This condition may stimulate local economic growth and raise regional original income receipts (PAD). Of Indonesia's 20 provinces, NTB is among the best. With some complicated land abandonment causes, the proportion of the land area suggested to be abandoned to the plantation land area is 10.6%. If left unchecked, this land's abandonment will have a negative impact, one of which is economic loss. This research method uses descriptive qualitative analysis, with field identification data collection techniques, interviews, documentation and literature review. After analyzing the data related to the research, it was concluded that there were indications of abandoned land in three districts on the island of Lombok, including East Lombok Regency, with a land abandonment rate of 22 years and Central Lombok, with a land abandonment rate of 23 years and North Lombok with a land abandonment rate of 28 years. According to calculations of the projected losses of the plantation industry on abandoned land, the number of production losses and plantation labor on abandoned land is affected if the area is left unmanaged or without any use. Meanwhile, the conflict between parties and a lack of nearby supportive infrastructure are the main causes of land abandonment.

Keywords: Economic Losses, Plantation, Factors, Abandoned Land

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Hamsina, M.Pd
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ..... **iii**
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ..... **iv**
LEMBAR PENYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**
MOTTO HIDUP ..... **vii**
LEMBAR PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
ABSTRAK ..... **xi**
ABSTRAC ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR PETA ..... **xvii**
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan 7
1.4 Manfaat 8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian 8
1.6 Kerangka Berpikir 9
1.7 Sistematika Penulisan 10
BAB II KAJIAN PUSTAKA 12
2.1 Terminologi Judul 12
2.2 Landasan Teori 15
1. Definisi Tanah Terlantar 15
2. Tanah sebagai modal dasar pertumbuhan ekonomi 17
3. Tanah sebagai Input Subsektor Pertanian 18
4. Tanah Terindikasi Terlantar 19

5. Objek penertiban tanah terlantar 20
6. Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah 21
7. Kriteria Tanah Terlantar 21
8. Faktor Penyebab Tanah Terlantar 23
9. Penataan Ruang 25
10. Kesesuaian Lahan terhadap Tanah Terlantar 26
11. Analisis perekonomian 27
2.3 Dasar Kebijakan 27
2.4 Penelitian Terdahulu 29
BAB III METODE PENELITIAN 33
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 33
3.2 Jenis Penelitian 34
3.3 Pendekatan Penelitian 34
3.4 Metode Pengumpulan Data 35
3.5 Variabel Penelitian 36
3.6 Populasi dan Sampel 38
3.6.1 Populasi Penelitian 38
3.6.2 Sampel dan Teknik Penelitian 38
3.7 Metode Analisis Data 38
3.7.1 Metode identifikasi tanah terlantar 38
3.7.2 Metode analisis perhitungan kerugian ekonomi pada sektor perkebunan . 39
3.7.3 Metode analisi Faktor Penelantaran Tanah 40
3.8 Alur Penelitian 41
3.9 Desain Survey 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 48
4.1 Gambaran Umum Kawasan 48
4.2 Identifikasi Lokasi Sebaran Tanah Terindikasi Terlantar 48
4.2.1 Kabupaten Lombok Timur 48
4.2.2 Kabupaten Lombok Tengah 56
4.2.3 Kabupaten Lombok Utara 63

4.3 Potensi Kerugian Ekonomi Pada Tanah Terindikasi Terlantar Pada Sektor Perkebunan 69
4.3.1 Produktivitas dan Kepadatan Output perkebunan 70
4.3.2 Estimasi Kerugian Ekonomi Subsektor Perkebunan 71
4.4 Faktor Penelantaran Tanah 72
4.4.1 Kabupaten Lombok Timur 72
4.4.2 Kabupaten Lombok Tengah 73
4.4.3 Kabupaten Lombok Utara 74
BAB V PENUTUP 75
5.1 Kesimpulan dan Saran 75
5.2 Rekomendasi dan Saran 75
DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Presentase Luas Tanah Terindikasi Terlantar Tahun 2019 4
Tabel 1.2 Data tanah terindikasi terlantar di Pulau Lombok NTB 6
Tabel 2.1 penelitian terdahulu 29
Tabel 3.1 Variabel Penelitian 36
Tabel 3.2 Desain Survei 42
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kabupaten Lombok Timur 49
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Timur tahun 2020 50
Tabel 4.3 Data Daftar Nama Pemegang Hak Guna Bangunan Tanah Terindikasi Terlantar Di Kabupaten Lombok Timur 52
Tabel 4.4 Luas Wilayah Kabupaten Lombok Tengah 57
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kabupaten Lombok Tengah 57
Tabel 4.6 Daftar Nama Pemegang Hak Guna Bangunan tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Lombok Tengah 59
Tabel 4.7 Luas perkecamatan di Kabupaten Lombok Utara 63
Tabel 4.8 Jumlah Penduduk Perkecamatan di Kabupaten Lombok Utara 64
Tabel 4.9 Data Daftar Nama Pemegang Hak Guna Bangunan tanah terindikasi terlantar di Kabupaten Lombok Utara 65
Tabel 4.10 Data perkebunan tahun 2020 69
Tabel 4.11 Produktivitas dan kepadatan output perkebunan kabupaten secara umum tahun 2022 70
Tabel 4.12 Estimasi Kerugian Ekonomi Subsektor Perkebunan Tahun 2022 71

DAFTAR PETA

Peta 3.1 Administrasi Pulau Lombok 33
Peta 4.1 Administrasi Desa Pemokong Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur 54
Peta 4.2 Citra Lokasi Tanah Terindikasi Terlantar Kabupaten Lombok Timur . 55
Peta 4.3 Administrasi Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah 61
Peta 4.4 Citra Lokasi Tanah Terindikasi Terlantar Kabupaten Lombok Tengah 62
Peta 4.5 Administrasi Desa Malaka Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara..... 67
Peta 4.6 Citra Lokasi Tanah Terindikasi Terlantar Kabupaten Lombok Utara .. 68

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya alam yang langka, tanah juga menjadi salah satu hal penting bagi kelangsungan hidup manusia, hal ini disebabkan oleh karakter khusus, fungsi dan peran tanah yang bisa memberikan berbagai manfaat sehingga bernilai ekonomis bagi pemiliknya. Pengunaan atas tanah yang terus meningkat tidak sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk disuatu wilayah karena jumlah tanah dan persediaannya relatif tetap.

Tiga elemen pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia yang dimana menjadi sumber utama tenaga kerja, teknologi, dan akumulasi kapital. Akumulasi kapital terjadi jika porsi penghasilan dijadikan tabungan dan diinvestasikan untuk memperluas output dan penghasilan di masa mendatang. Termasuk dalam akumulasi kapital ini adalah modal fisik yang berupa peralatan dan mesin, gedung/bangunan, dan tanah. Oleh karenanya tanah merupakan salah satu modal dasar (*basic capital*) dalam pertumbuhan ekonomi (Sembiring & Wibowo, 2019).

Tanah terlantar merupakan sumber daya yang tidak dimanfaatkan baik untuk kepentingan ekonomi maupun lingkungan. Dari perspektif ekonomi, berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli, tanah terlantar merupakan tanah yang tidak dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi sehingga tidak bernilai ekonomis (Sembiring & Wibowo, 2019).

Dalam hal ini, jumlah tanah kosong yang belum dimanfaatkan secara langsung dapat berdampak pada perekonomian suatu daerah karena hilangnya manfaat tanah sebagai sumber ekonomi, pada dasarnya tanah dapat mendatangkan keuntungan yang optimal jika dimanfaatkan sesuai fungsinya. Menurut (Setiawan Bhakti, 2013) tanah dapat menghasilkan pendapatan secara langsung dan tidak langsung dimana secara langsung pendapatan didapatkan dari penggunaan tanah sebagai tanah pertanian, perkebunan dan lain-lain atau dapat dikembangan dengan mendirikan suatu bangunan seperti ruko, hotel, mall dan lainnya, begitupun

sebaliknya tanah jika tidak dimanfaatkan secara langsung tidak akan memiliki nilai ekonomis (Tama, 2017).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) secara konsisten mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang salah satunya dilakukan penertiban tanah terlantar. Rekapitulasi tanah terlantar berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia dalam skala Nasional tahun 2010 terdapat 900 bidang tanah HGU yang peruntukan haknya sebagian besar di sektor perkebunan diindikasi tidak dimanfaatkan dengan total luas tanah 962,9 ribu Ha. Sedangkan pada tahun 2019 tahan berstatus HGU terindikasi terlantar mengalami peningkatan hampir 25% yaitu dengan total luas sebesar 1,2 juta Ha di 973 bidang tanah (*Wibowo, 2020)*

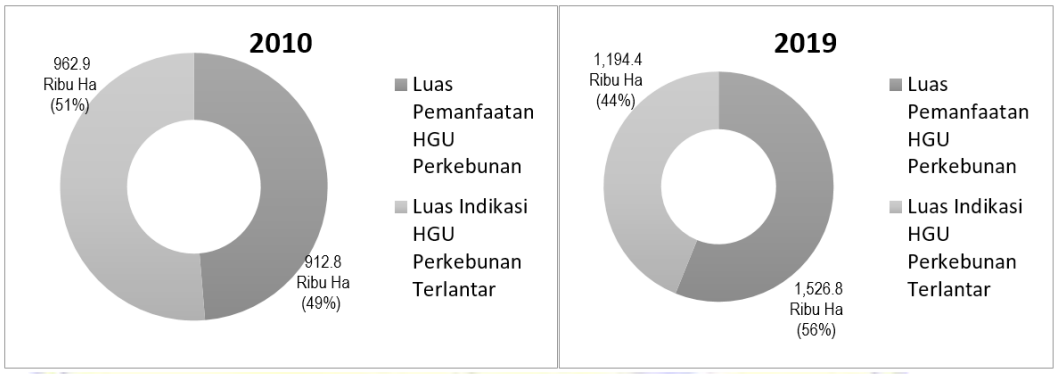

Sumber: Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar, Kem ATR/BPN (2019), diolah

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu wilayah di Kepulauan Indonesia yang memiliki topografi cenderung berbukit dengan ketinggian 0 mdpl hingga di atas 100 mdpl. Luas wilayah 21.242.25 Ha dengan jumlah penduduk ditahun 2018 mencapai 4.896.162 jiwa. Sementara itu, NTB merupakan salah satu kawasan teratas dari 20 Provinsi di Indonesia dengan presentase luasan tanah terindikasi telantar terhadap luas tanah perkebunan sebanyak 10,6%. (*Wibowo, 2020)*

Tabel 1.1 Presentase Luas Tanah Terindikasi Terlantar Tahun 2019

Provinsi	Luas Perkebunan (Ribu Hektar)	Luas Tanah Terlantar (Ribu Ha)	% Luas Tanah Terlantar Terhadap Luas Perkebunan
NTB	162.6	17.25	10.6%
Jabar	413.4	23.73	5.7%
Jateng	458.3	0.80	0.2%
DIY	68.6	-	0.0%
Jatim	846.3	4.89	0.6%
Kalbar	2075.6	86.17	4.2%
Kalteng	1851.3	74.73	4.0%
Kalsel	847.7	59.56	7.0%
Kaltim	1220.3	211.55	17.3%
Sulut	377.0	10.90	2.9%
Gorontalo	150.3	1.04	0.7%
Sulteng	788.4	25.01	3.2%
Sulsel	625.6	72.23	11.5%
Sulbar	414.3	21.72	5.2%
Bali	149.0	0.62	0.4%
NTT	453.9	33.09	7.3%
Maluku	249.6	8.46	3.4%
Papua	247.4	6.65	2.7%
Papua Barat	148.8	26.91	18.1%
Indonesia	26,559.5	1,194.37	4.5%

Sumber: Wibowo, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat tanah terlantar sebanyak 17.25 Ribu Ha terlantar selama 11 tahun tanpa dilakukan aktifitas pembangunan diatasnya oleh pemiliki tanah atau sekitar 92 perusahaan badan hukum (Sembiring & Wibowo, 2019).

Dicatat dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2021, dalam basis data tanah terindikasi terlantar masih terdapat 35,1347 Ha HGB yang sedang dilakukan penertiban pada wilayah Nusa Tenggara Barat (Kem ATR/BPN, 2019). Yang dimana penelantaran akan tanah ini terjadi hampir seluruh wilayah di Provinsi NTB rentan terhadap penelantaran tanah khususnya pada wilayah pulau lombok pada kawasan yang kurang akan aktivitas. Untuk itu agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut terkait jumlah tanah terindikasi terlantar di pulau lombok.

Tabel 1.2 Data tanah terindikasi terlantar di Pulau Lombok NTB

Kota/Kabupaten	Luas Tanah Perkebunan (Ha)	Produksi Perkebunan (Ton)	Luas tanah terindikasi terlantar (Ha)
Lombok Timur	19,776	7.569	24,1200
Lombok Tengah	17,839	10.186	6,7549
Lombok Utara	26,285	15.918	4,2598
Total	63,900	33.673	35,1347

Sumber: Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar, Kem ATR/BPN (2020), diolah

Sumber: Diolah dari Provinsi Dalam Angka 2020, BPS dan basis data dinas perkebunan

Dari data yang diperoleh banyak kawasan tanah terlantar yang pemberian ijin tidak sesuai terhadap peruntukan pola ruang RTRW disetiap Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Lombok. Pada umumnya, tanah bila dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan peruntukannya serta faktor yang mempengaruhi pengembangan tanah akan memberikan kontribusi bagi daerah serta dapat memberi nilai lebih bagi suatu kawasan jika pengunaannya dapat dikelola dengan baik. Hal ini juga dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat dan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena adanya anggaran dari pembayaran pajak akan tanah sehingga mendatangkan dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB). Tanah kosong tersebut diduga tidak melakukan pembayaran akan pajak, dikutip dari informasi digital ada beberapa pendapat yang mengatakan aturan akan pajak akan bersifat sementara jika di jadikan tahapan penanganan akan tanah terlantar kecil kemungkinannya dapat mengatasi penelantaran akan tanah (RumahCom, 2017).

Dalam persoalan ini peneliti akan melakukan identifikasi terhadap tanah terlantar sehingga dapat diketahui dengan jelas kerugian ekonomi wilayah terhadap tanah terlantar dan dapat diketahui faktor penyebab penelantaran tanah tersebut sehingga dapat memberi gambaran bagi pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengidentifikasi lokasi sebaran tanah terlantar ?
2. Menghitung potensi kerugian ekonomi yang timbul akibat hak guna usaha (HGU) dan hak guna bangun (HGB) pada sektor perkebunan yang terlantar ?
3. Mengidentifikasi faktor penyebab penelantaran tanah ?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui lokasi sebaran tanah terlantar serta mengetahui kriteria tanah terlantar
2. Untuk mengetahui potensi kerugian ekonomi sektor perkebunan suatu wilayah terhadap dampak tanah terlantar di Pulau Lombok Nusa Tenggar Barat (NTB)
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penelantaran tanah.

1.4 Manfaat

Manfaat Penelitian ini yaitu manfaat terhadap nilai ekonomis, daerah dan masyarakat.

1. Bagi Pemerintah dan Daerah

   Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam memanfaatkan tanah kosong dalam mengevaluasi para pemilik tanah agar dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga mampu meningkatkan perekonomian daerah serta sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam pemberian ijin lokasi
2. Bagi Masyarakat

   Dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat lokal dalam memanfaatkan tanah dan terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua (2) yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup substansi :

1. Ruang Lingkup Wilayah

- Ruang Lingkup Makro

Secara astronomis, Nusa Tenggara Barat terletak antara $8^0$10'-$9^0$5' Lintang Selatan dan antara $115^0$46'-$119^0$05' Bujur Timur. Nusa Tenggara Barat memiliki luas kawasan sebesar 2.012.448 Km^2 dengan jumlah penduduk tahun 2019 yaitu 5.070.385 jiwa dengan kepadatan penduduk 252 Km^2. Nusa Tenggara Barat (NTB) terdiri dari 10 kabupaten/kota yang terletak di dua pulau besar yaitu :

- Pulau Lombok: Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram.
- Pulau Sumbawa: Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Bima.

Adapun batas-batas administrasi wilayah Nusa Tenggara Barat :

Utara : Laut Jawa dan Laut Flores

Selatan : Samudera Hindia

Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali

Timur : Selat Sape dan Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Ruang Lingkup Mikro

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini berbentuk bulat dengan semacam ekor di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km dengan luas pulau mencapai 5.435 km^2 dengan jumlah penduduk 3.758.631 jiwa. Pulau Lombok memiliki 5 Kota/Kabupaten antaranya yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupate Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram.

2. Ruang Lingkup Substansi

Kajian materi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber data yang diperoleh dari literatur, serta rereferensi

seperti dokumen-dokumen kebijakan terkait, serta informasi yang berasal dari lokasi penelitian. Substansi penelitian ini adalah mengidentifikasi sebaran tanah terindikasi terlantar, memperhitungkan dampak kerugian ekonomi sektor perkebunan terhadap tanah terindikasi terlantar serta mengetahui faktor penyebab penelantaran lahan. Dalam penelitian ini juga kajian materi yang digunakan melainkan sampel dari tiga (3) Kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara sebab keterbatasan akan data dan adanya dokumen rahasia dari pihak instansi yang tidak boleh disebarluaskan.

1.6 Kerangka Berpikir

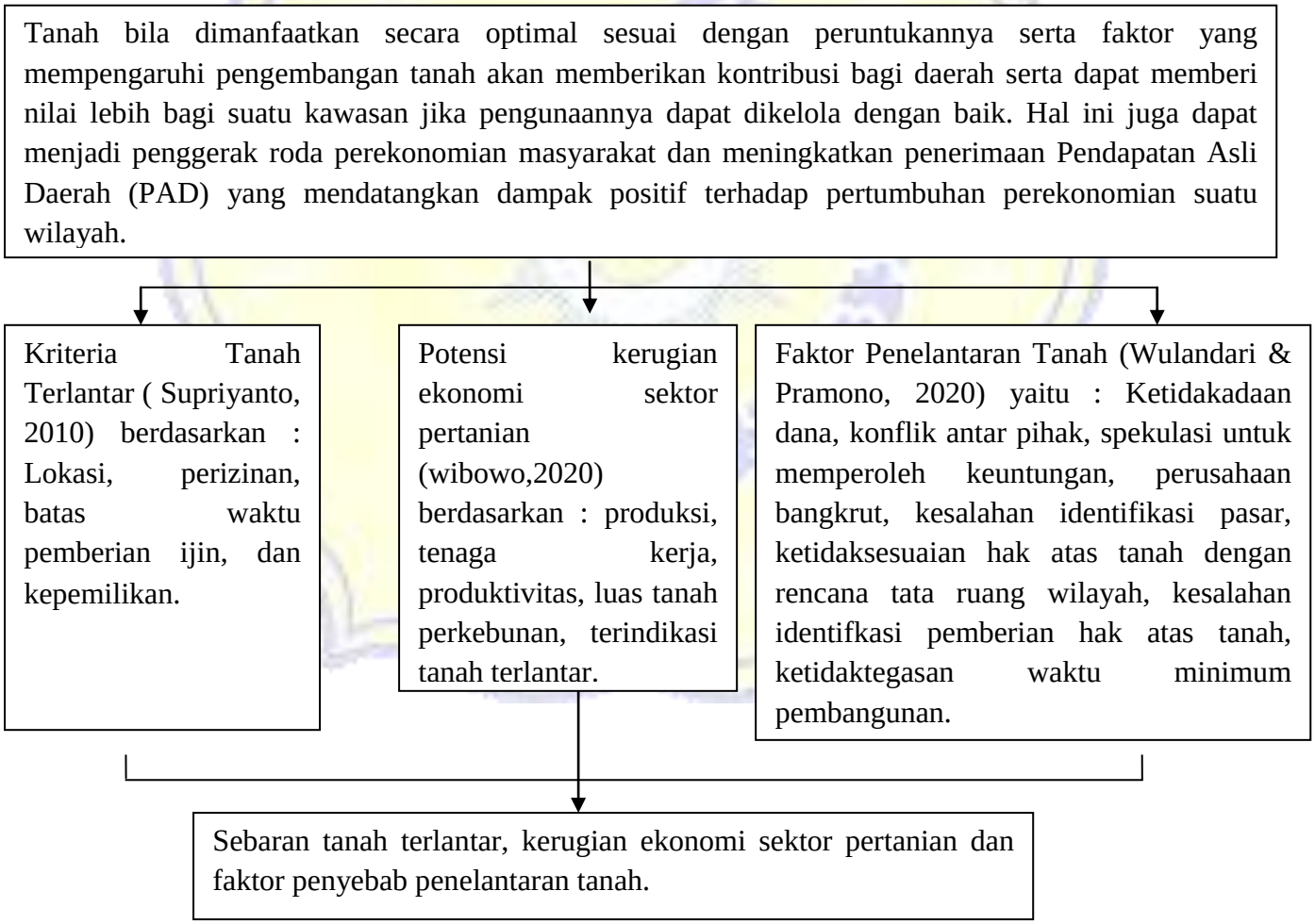

Gambar 1. Kerangka Penelitian

1.7 Sistematika Penulisan

Terdapat sistematika penulisan dalam penelitian ini yang terdiri atas:

Bab I Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka yang terdiri atas terminologi judul, tinjauan teori, tinjauan kebijakan dan penelitian terdahulu

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri atas lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode analisis data, dan teknik analisis.

Bab IV Hasil dan Pembahasan yang terdiri atas gambaran umum kawasan, identifikasi sebaran tanah terlantar, potensi kerugian ekonomi sektor perkebunan, dan faktor tanah terlantar.

Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Terminologi Judul

1. Pengertian Tanah Terlantar

Tanah menurut Kamus Tata Ruang adalah lahan/tanah terbuka yang dihubungkan dengan arti atau fungsi sosio-ekonominya bagi masyarakat yang dapat berupa tanah terbuka, tanah garapan, maupun tanah/tanah yang belum diolah atau diusahakan. Sedangkan tanah terlantar Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, dijelaskan tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya.

2. Perekonomian Wilayah Terhadap Tanah Terlantar

Tindakan penelantaran tanah adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya potensi ekonomi sebab tanah memiliki nilai ekonomis yang tinggi jika dijadikan properti atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Ekonomi akan relatif dapat lebih berkembang jika ketimpangan tanah lebih berkurang, beberapa penelitian di Indonesia mengindikasikan kerugian ekonomi akibat tanah yang ditelantarkan (Easterly, 2001) dan (Rodrik, 2007). Perbuatan atas tanah yang mengakibatkan tanah terlantar berdampak terhadap kerugian dengan hilangnya potensi ekonomi tanah (Limbong, 2017).

Tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya dapat menjadi salah satu faktor yang menghambat pembangunan sebab jika tanah tidak dimanfaatkan atau tidak diusahakan sesuai fungsinya maka kesejahteraan masyarakat akan cenderung rendah karena masyarakat menjadi salah satu aspek yang memanfaatkan tanah,

sehingga pada gilirannya pemanfaatan tanah dapat menjadi obyek pendapatan Negara. Selain itu, hal tersebut berpotensi mengakibatkan ketahanan pangan dan ekonomi yang rentan, serta terkuncinya akses sosio-ekonomi masyarakat (Sembiring & Wibowo, 2019).

3. Tanah sebagai Input Subsektor Pertanian

Pentingnya tanah sebagai faktor produksi dalam sektor pertanian merupakan faktor produksi kedua terpenting, faedah *(utility)* dan manfaat tanah sebagai sumber daya perlu dijaga (fungsi ekologis). Tanah adalah tujuan, tanah merupakan meta-ekonomis, keramat dalam pengertian bahwa tanah tidak bisa dibuat oleh manusia, maka perlu dijaga kelestariannya (Sembiring & Wibowo, 2019).

2.2 Landasan Teori

1. Definisi Tanah Terlantar

Definisi tanah terlantar sangat kompleks hasilnya tidak sepenuhnya akan sama artinya tergantung dari definisi atau kutipan siapa yang akan kita pilih.

- Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban kawasan dan Tanah Terlantar

  Pengertian tanah terlantar dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 yang dijelaskan bahwa, tanah hak, tanah Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara. Demikian pula tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohon hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan

hutan, atau dalam izin lainnya dari pejabat yang berwenang. (Presiden Republik Indonesia, 2010)

- Menurut Dallio (2003), mendefinisikan tanah terlantar sebagai suatu pergeseran dari pola tertentu penggunaan tanah dari yang bersifat ekstensif pada tanah pertanian tradisional ke pola penggunaan tanah yang kurang intensif yang disebabkan oleh penurunan aktivitas manusia, dan mengakibatkan tanah menjadi semak belukar termasuk pada kawasan hutan.
- Tanah terlantar tidak selalu berkaitan dengan kurangnya kegiatan pertanian tetapi juga dapat terjadi karena perubahan dalam penggunaan lahan, dari penggunaan tradisional yang kurang intensif (Sembiring & Wibowo, 2019).

2. Tanah sebagai modal dasar pertumbuhan ekonomi

Tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi menurut (Nurcahyo & Manurung, 2016) :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.

2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.

3. Kemajuan teknologi.

3. Tanah sebagai Input Subsektor Pertanian

Pentingnya tanah sebagai faktor produksi dalam sektor pertanian merupakan faktor produksi kedua terpenting, faedah *(utility)* dan manfaat tanah sebagai sumber daya perlu dijaga (fungsi ekologis). Tanah adalah tujuan, tanah merupakan meta-ekonomis, keramat dalam pengertian bahwa tanah tidak bisa dibuat oleh manusia, maka perlu dijaga kelestariannya (Sembiring & Wibowo, 2019).

4. **Tanah Terindikasi Terlantar**

Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 24 Tahun 2002, identifikasi tanah terlantar dilakukan dalam jangka waktu minimal ditetapkan sebagai berikut :

a. Hak milik, 5 tahun sejak diterbikan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan
b. Hak guna usaha, 5 tahun sejak diterbikan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan
c. Hak guna bangun, 3 tahun sejak diterbikan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan
d. Hak pakai, 3 tahun sejak diterbikan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan
e. Hak pengelolaan, 5 tahun sejak diterbikan sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan

Setelah inventaris tanah terindikasi terlantar ditindaklanjuti dari berbagai aspek antaralain administrasi, identifikasi lapangan dan lainnya. Jika terhitung 3 tahun dari berakhirnya masa kontrak atau izin atas tanah tetapi masih belum ada pengelolaan, pemanfaatan, pembangunan atas tanah tersebut maka tanah tersebut ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Penertiban tanah terlantar sesuai yang tertera pada Peraturan Mentri No. 20 Tahun 2021 pasal 21 terdapat tahapan mengenai penertiban tanah terlantar antaranya :

a. Pengecekan inventaris tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar
b. Identifikasi dan penelitian tanah tanah terindikasi terlantar
c. Peringatan terhadap pemegang hak
d. Penetapan tanah terlantar.

5. **Objek penertiban tanah terlantar**

Sesuai dengan PP. Nomor 20 tahun 2021 tentang tentang Penertiban kawasan dan Tanah Terlantar, objek penertiban tanah

terlantar sebagaimana dimaksud pasal 7 meliputi, tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, Hak Pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah. Tanah hak milik menjadi objek penertiban jika dengan sengaja tidak dipergunakan, tidak dipelihara dan/atau tidak dimanfaatkan sehingga dikuasai oleh masyarakat serta menjadi wilayah perkampungan, dikuasai oleh pihak lain secara terus-menerus selama 20 tahun tanpa hubungan badan hukum dengan pemegang hak. Sedangkan tanah hak guna bangun, hak usaha, hak pakai, hak pengelolaan menjadi objek penertiban tanah terlantar jika dengan sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara sejak 2 tahun diterbitkan hak atau ijin.

6. Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah

Sesuai dengan PP. Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara penertiban tanah. Hak Pengelolaan pasal 1 menjelaskan " hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya" seperti hak-hak tanah yang lain atas tanah yang lain dimana hak-hak tersebut dapat habis karena sesuatu hal, maka hak pengelolaannya juga habis (Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn, 2020). Dalam hal ini hak pengelolaan habis karena :

a. Hapusnya hak atas tanah atau hak pengelolaan
b. Putusnya hubungan hukum
c. Dicabut oleh negara untuk kepentingan umum

7. Kriteria Tanah Terlantar

Kriteria tanah yang digolongkan menjadi tanah terlantar yang dikemukakan oleh (Supriyanto, 2010) adalah:

1. Tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang atau tanah yang tidak terdapat hak milik atasnya.

2. Tanah yang tidak digarap, yaitu dapat dibuktikan dengan tanda-tanda pada tanah tersebut seperti pemagaran, bekas penggarapan dan tanda-tanda lainnya yang biasa dipakai oleh masyarakat setempat.

3. Tanah yang berada jauh diluar perkampungan

Berdasarkan UUPA maka ada beberapa azas yang perlu diperhatikan dalam masalah penelantaran tanah. Dinyatakan dalam pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hal ini bermakna bahwa penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara (Hatagalung & Gunawan, 2008). Pemanfaatan ataupun penggunaan tanah oleh orang/badan hukum sebenarnya adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu telah ditentukan dalam pasal 15 UUPA bahwa: "Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum, atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah".

4. Tanah yang sudah diperoleh penguasanya, tetapi belum diperoleh hak atas tanah dapat dinyatakan sebagai tanah terlantar, apabila tanah tersebut oleh pihak yang memperoleh dasar penguasaan tidak dimohon haknya atau tidak dipelihara dengan baik.

8. Faktor Penyebab Tanah Terlantar

Sesuai dengan penjelasan pasal 27 UUPA, dijelaskan tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan dari pada haknya maka hak-hak atas tanah tersebut dapat dicabut atau dihapus. Dari hasil penelitian yang dilakukan (Wulandari & Pramono, 2020) bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya tanah terlantar dijabarkan sebagai berikut:

1. Ketiadaan Dana

Hasil penelitian diperoleh bahwa ketersediaan dana menjadi faktor mutlak bagi seseorang untuk melakukan pembangunan terhadap

tanahnya. Beberapa stakeholder menyatakan motif pemilik tanah tidak bisa membangun disebabkan ketiadaan uang sebagai modal untuk membangun. Pemilik tanah yang tidak mampu membayar pinjaman beserta bunga yang diwajibkan oleh pihak bank, berdampak kredit macet dan mengalami gagal bayar. Akibat ketidakmampuan tersebut, tanah yang dimiliki oleh pemegang hak tidak dapat dilanjutkan lagi pembangunannya sehingga menjadi tanah terlantar.

2. Konflik Antar Pihak

Tidak hanya masalah dana, adanya konflik antar pihak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penelantaran tanah. Akibatnya pemanfaatan tanah tidak lagi menjadi prioritas bagi manajemen perusahaan namun lebih berfokus pada penyelesaian konflik.

3. Spekulasi Untuk Memperoleh Keuntungan

Adanya motif pemegang hak berspekulasi untuk memperoleh keuntungan menjadi alasan pemegang hak belum memanfaatkan tanahnya. Tanah dinilai sebagai jaminan investasi karena mampu menghasilkan keuntungan finansial. Pemilik tanah sengaja membeli tanah agar di masa mendatang, harga tanah menjadi jauh lebih tinggi dibandingkan saat pembelian.

4. Perusahaan Bangkrut

Alasan lainnya pemegang hak menelantarkan tanah karena pemegang hak mengalami wanprestasi atau bangkrut. Gagalnya usaha yang dijalankan oleh pemegang hak berakibat kerugian finansial yang berujung pada kolapsnya perusahaan. Pailitnya perusahaan akibat ketidakmampuan perusahaan memanajemen perusahaan secara sehat dan baik.

5. Kesalahan Identifikasi Pasar

Motif lainnya adalah kesalahan pemegang hak dalam identifikasi peluang pasar. Pasar tanah sangat tergantung pada permintaan dan penawaran. Dalam menjalankan usahanya, seharusnya pemilik tanah

dapat memperhitungkan keadaan pasar, apakah investasi yang telah digelontorkan memiliki keuntungan atau justru sebaliknya. Minimnya informasi dan ketidakjelian melihat potensi pasar berakibat pada kesalahan dalam memperhitungkan prospek keuntungan.

6. Ketidaksesuaian Hak Atas Tanah dengan Rencana Tata Ruang Akibat Perubahan Tata Ruang

Hasil penelitian ditemukan bahwa pemilik tanah belum membangun karena adanya ketidaksesuaian hak atas tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menjadikan pemanfaatan tanah tidak sesuai dengan peruntukan tanahnya. Perubahan kebijakan terutama kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah disesuaikan dengan kondisi pemanfaatan tanah saat ini.

7. Kesalahan Dalam Menganalisis Kelayakan Pemberian Hak Atas Tanah

Kesalahan analisis kelayakan pemberian hak dapat menyebabkan pemberian hak atas tanah tidak sesuai dengan peruntukannya. Hal tersebut berimbas pada tertundanya pembangunan hak atas tanah. Lokasi sudah sesuai dengan peraturan zonasi, namun terkadang informasi yang diberikan oleh pemilik tanah tidak sesuai dengan administrasi yang ditentukan.

8. Ketidaktegasan Waktu Minimum Pembangunan

Ketidaktegasan batas waktu minimum pembangunan dapat menyebabkan terjadinya penelantaran tanah. Pemerintah harusnya memberikan batas waktu minimum yang tegas terkait pembangunan hak atas tanah agar tidak terjadi penelantaran tanah.

9. Belum Membangun Karena Politik Pemerintah

Alasan pemegang hak belum memanfaatkan dan menelantarkan tanahnya adalah akibat politik pemerintahan. Politik pemerintahan yang selalu berubah-ubah, tergantung perubahan iklim politik negara menjadikan beberapa kebijakan tidak berjalan maksimal sehingga

pengawasan dan pengendalian terhadap hak atas tanah tidak terkoordinasi optimal.

9. Penataan Ruang

Ruang menurut undang-undang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut dan udara termaksud ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan yang dimaksud ruang dalam istilah tata ruang adalah tanah menurut peruntukannya sebagaimana ditetapkan dalam RTRW oleh pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan bersama atau masyarakat dan menjadi pedoman bagi setiap pemegang hak untuk memenuhi kewajibannya menggunakan tanahnya sesuai dengan tata ruang sebagimana ditetapkan dalam pasal 1 ayat (5) yaitu penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang. Dalam pasal 61 ayat (a) menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. (Presiden Republik Indonesa, 2007)

10. Kesesuaian Lahan terhadap Tanah Terlantar

Kebutuhan penggunaan lahan berkaitan erat dengan sistem aktivitas antara manusia dengan kelembagaan yaitu individu, rumah tangga, dan institusi. Arsyad, (2010) menyebutkan ada tiga faktor penting yang dipertimbangkan dalam menggunaan lahan yaitu kesesuaian bio-fisik, kelayakan sosial ekonomi, dan kelayakan kelembagaan. Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, binatang dan kependudukan. Arsyad, (2010) mengelompokkan penggunaan tanah kedalam dua golongan besar yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan pertanian yaitu penggunaan lahan tegalan, sawah, kebun, padang rumput, hutan, padang alang-alang, dan sebagainya. Sedangkan penggunaan lahan bukan pertanian yaitu penggunaan

lahan kota atau desa (pemukiman), industri, rekreasi, pertambangan, dan sebagainya.

Penggunaan lahan tiap daerah berbeda-beda. Perbedaan penggunaan lahan dipengaruhi oleh keadaan alam dan kebutuhan manusia yang berada di wilayah tersebut. Penggunaan lahan ditandai dengan pengaturan, kegiatan dan masukan oleh orang-orang untuk memproduksi, mengubah atau mempertahankan jenis tutupan lahan tertentu. Penggunaan lahan (land use) diartikan sebagai setiap bentuk intervensi (campur tangan) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Arsyad, 2010). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan lahan tergantung pada kebutuhan manusia, baik itu sesuai ataupun tidak.

11. Analisis perekonomian

Metode analisis data yang dilakukan dalam Penelitian ini, menggunakan beberapa asumsi agar hasil penelitian ini dapat diterima secara umum. Asumsi-asumsi yang digunakan antara lain:

1. objek tanah HGU dan HGB yang terindikasi terlantar dalam analisis peruntukannya adalah untuk lahan perkebunan
2. data hasil produksi pekebunan terdiri dari banyak komoditas akan tetapi dalam studi ini kami menggunakan total komoditas perkebunan dengan tidak memisahkan komoditas per komoditas
3. faktor-faktor yang memengaruhi objek tanah menjadi terlantar kami asumsikan nol atau semua faktor tetap (*ceteris paribus*).

potensi kerugian ekonomi merupakan perbedaan output ekonomi antara skenario baseline *(business as usual/BAU)* dan skenario output dari perlakuan diluar skenario BAU. Skenario BAU adalah skenario proyeksi kondisi saat ini, tanpa adanya perubahan kebijakan yang berlaku dan intervensi lainnya yang dapat menekan laju konsumsi. Sebagai output kontrafaktual *(cou terfactual output)* adalah skenario output ekonomi yang diharapkan jika tanah terlantar dimanfaatkan

sesuai peruntukannya, dalam hal ini HGU perkebunan. Output ekonomi umumnya didefinisikan sebagai produksi barang dan jasa dalam suatu sistem ekonomi dalam kurun waktu satu tahun.

2.3 Dasar Kebijakan

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar khususnya pada pasal 180 menjelaskan bahwa :

- Hak, izin , atau konsesi atas tanah yang dengan sengaja tidak diusahakan atau diterlantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara.
- Dalam pelaksanaan pengembalian kepada negara, pemerintah pusat dapat menetapkan hak, izin atau konsensi tersebut sebagai aset bank tanah yang diatur dalam peranturan pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban kawasan dan Tanah Terlantar.
3. Peraturan Mentri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penertiban Dan Pendayagunaan Kawasan Dan Tanah Telantar
4. Peraturan Kepala BPN RI No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.
5. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar

   pada pasal 16 menjelaskan terkait perusahaan perkebunan wajib mengusahakan tanah perkebunan paling lambat 2 tahun setelah pemberian status hak atas tanah dan jika tanah perkebunan tidak diusahakan sesuai ketentuan maka tanah yang belum diusahakan akan diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. (Presiden Republik Indonesia, 2020)
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Kementrian Agraria Dan Tata Ruang

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Masalah dan Tujuan	Variabel dan Analisis	Hasil Pembahasan	Perbedaan penelitian
1.	Rio Jaka Tama dan Rifki Khoirudin	Penilaian dengan Metode *Land Development Analysis* (Studi Kasus lahan di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan)	Masalah: penilai potensi tanah kosong (terlantar) untuk dioptimalkan dan dikembangkan Tujuan: untuk mendapatkan hasil proyeksi besar nilai tanah dan potensi dari tanah tersebut sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat dimanfaatkan sesusi fungsinya	variabel-variabel yang didapat dari hasil sintesa terkait : 1. Kesesuaian, yaitu kesesuaian pendekatan, kesesuaian properti pembanding yang digunakan dan kesesuaian analisis yang dilakukan. 2. Keakuratan tiap pendekatan yang digunakan. 3. Kuantitas dan kualitas bukti-bukti/data pembanding.	Hasil penelitian : Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi Perumahan sederhana. Dampak positif dari pengembangan perumahan bias menggerakan roda perekonomian di sekitar objek penilaian dan menambah kas penerimaan daerah bila melalui	Output yang dihasilkan pada penelitian ini merupakan nilai kerugian ekonomi pada sektor pertanian serta dapat diketahui faktor yang menyebabkan penelantaran tanah. Untuk itu yang menjadi fokus penelitian lebih kepada ruang lingkup mikro (kabupaten/kota).

					penerimaan pajak.	
2.	Lini Ratnasari	Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BPN Dalam Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 (Studi Di Kantor BPN Kabupaten Lombok Tengah)	Masalah : Di Kabupaten Lombok Tengah kasus penelantaran tanah ini bukan merupakan suatu fenomena yang baru karena dalam kurun waktu 15 tahun kebelakang ternyata penelantaran tanah ini sudah terdata di BPN dimana para pelakunya adalah para investor mengingat Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu daerah yang paling kaya akan potensi wisata di Provinsi NTB sehingga para investor pun tertarik untuk membangun kegiatan usaha di bidang pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah untuk itu penyesuaian tugas dan fungsi BPN dalam penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar berdasarkan PP Nomor 11 tahun 2010 menjadi hal utama yang	Variabel yang didapatkan dalam sintesa ini yaitu terkait penelantaran tanah dan tanah terindikasi terlantar	Pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar menjadi tanah terlantar di Kabupaten Lombok Tengah secara keseluruhan memang masih belum efektif dilakukan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 oleh BPN karena sampai sejauh ini masih banyak tanah terindikasi terlantar yang belum ditetapkan menjadi tanah terlantar oleh BPN Pusat padahal	

			harus diketahui terkait penerapannya. Tujuannya : dalam penelitian ini ini menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui fungsi dan peran BPN dalam pengelolaan tanah terlantar di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga diketahui apa yang menjadi kendalam dalam mengatasi masalah tanah terlantar		para pemegang hak atas tanah di Kabupaten Lombok Tengah tidak melakukan aktivitas di atas tanah yang telah dikuasainya	
3.	Benny Lala Sembiring dan Yohanes N Agung Wibowo	Menghitung Dampak Tanah Terlantar Terhadap Potensi Kerugian Ekonomi Di Indonesia	Masalah : banyaknya tanah terlantar di Indonesia berdampak terhadap kerugian ekonomi terhadapa suatu wilyh yang diman tanah memberi efek yang sangat besar bagi perekonomian suatu wilayah jika tidak dimanfaatkan sesuai fungsinya dan hilangnya penyerapan tenaga kerja dapat terjadi jika banyak tanah yang tidak difungsikan. Tujuan : untuk mengetahui kerugian ekonomi suatu wilayah terhadap tanah terlantar sehingga	Variabel dalam sintesa ini yaitu : - Produksi - Tenaga Kerja - Produktivitas - Luas lahan Perkebunan - Tanah Terindikasi Terlantar - Kepadatan dan tenaga kerja	Data pada level provinsi di Indonesia mengindikasikan potensi kerugian ekonomi subsektor perkebunan senilai Rp15 triliun dan penurunan pengangguran di atas angka 420 ribu orang. Bila dianalisis lebih detail, wilayah yang memiliki potensi kerugian yang tinggi berada	

			dapat menjadi acuan untuk pemerintah menangani maslah tanah terlantar		pada wilayah yang memiliki kekuatan di sektor pertanian.	

Sumber: Referensi Jurnal (2021)

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau di kepulauan Sunda Kecil atau Nusa tenggara yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Pulau ini berbentuk bulat dengan semacam ekor di sisi barat daya yang panjangnya kurang lebih 70 km dengan luas pulau mencapai 5.435 km^2 dengan jumlah penduduk 3.758.631 jiwa. Pulau Lombok memiliki 5 kota/kabupaten antaranya yaitu Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram. Lokasi penelitian ini lebih fokus kepada wilayah Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara yang memiliki data tanah terindikasi terlantar. Adapun batas administrasi Pulau Lombok yaitu :

Sebelah Barat : Selat Lombok
Sebelah Timur : Selat Alas
Sebelah Selatan : Samudra Hindia
Sebelah Utara : Laut Jawa

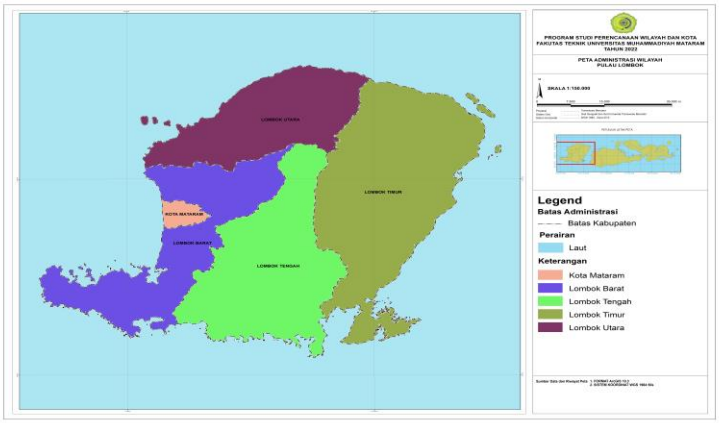

Peta 3.1 Administrasi Pulau Lombok

Sumber: SHP Provinsi NTB 2013, Peta Batas Administrasi

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendapatkan gejala-gejala, peristiwa, ataupun kejadian yang terjadi sekarang. Penelitian deskriptif lebih memfokuskan pada masalah-masalah yang aktual berdasarkan kondisi eksisting selama penelitian berlangsung. Pada penelitian deksriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi fokus (pusat) perhatian tanpa memberikan prilaku khusus terhadap peristiwa tersebut (Widodo & Mukhtar, 2000).

3.3 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan data-data deskriptif berupa rangkaian kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari pelaku (orang-orang) dan juga melalui prilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, pada pendekatan kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata/kalimat dan juga gambar, serta bukan merupakan angka-angka (penelitian yang membutuhkan perhitungan mendalam dan memiliki rumus baku yang wajib digunakan) (Moloeng, 2007). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap mengenai permasalahan yang dirumuskan, serta dapat memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul pada penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat menyeluruh, mendalam, alamiah dan sesuai kondisi yang nyata.

jenis penelitian kualitatif dilakukan untuk mengukur instrumen-instrumen dalam analisis data secara statistik deskriptif, data yang digunakan merupakan data sekunder (tanah terindikasi terlantar, luas lahan perkebunan, tenaga kerja, produksi perkebunan) dari 3 kabupaten di Pulau Lombok untuk mengetahui kerugian ekonomi terhadap tanah terlantar disuatu kawasan dan juga untuk mengetahui faktor yang menjadi penelantaran tanah terindikasi terlantar pada suatu kawasan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, hal ini dikarenakan tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data-data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data adalah melalui survei.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengunakan data tanah terindikasi terlantar dengan status HGU dan HGB. Penelitian ini memakai data panel pada tahun 2020 dari 3 kabupaten yang memiliki tanah dengan status HGU/HGB yang terindikasikan terlantar. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

1. Wawancara

   Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah teknik wawancara yang pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini, biasanya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dengan pihak yang diajak wawancara diminta pendapat atau ide-idenya (Sugiyono, 2007). Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab kepada beberapa pihak yang mengetahui atau menangani persoalan terkait tanah terlantar.

2. Observasi

   Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati karakteristik tanah terlantar sesuai dengan keadaan eksisting serta mengidentifikasi faktor penyebab penelantaran lahan.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi ini dilakukan untuk pengumpulan data berupa gambar sebagai bukti fisik kuat dari data yang dikumpulkan.

4. Literatur

   Pengumpulan literatur dilakukan dengan tujuan memperoleh data kepustakaan yang berkaitan dengan tanah terlantar baik berupa artikel, kebijakan, dokumen undang-undang.

3.5 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terkait variabel penentuan lokasi tanah terindikasi terlantar, kerugian perekonomian wilayah, faktor penelantaran tanah :

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Tujuan	Variabel	Deskripsi	Sumber
Untuk mengidentifikasi tanah terlantar	Lokasi	Data sebaran tanah terindikasi terlantar dapat berupa peta lokasi ataupun data lainnya terkait lokasi tanah terlantar.	Basis Data Tanah Terindikasi Terlantar, Kem ATR/BPN dan Kriteria tanah terlantar (supriyanto, 2010)
	Perizinan	Perizinan dalam hal ini terkait status perizinan baik itu di ijinkan sebagai HGU, HGB, Hak pakai dan lainnya.	
	Batas waktu pengajuan ijin	Batas waktu pemberian ijin HGU, HGB, Hak pakai dan lainnya sehingga dapat diketahui terkait waktu penelantaran tanah dan dapat identifikasi lebih lanjut.	
	Kepemilikan	Status kepemilikan tanah terlantar untuk mengetahui kriteria tanah yang mempermudah dalam identifikasi faktor penelantaran tanah.	
Untuk mengetahui kerugian ekonomi suatu kawasan terhadap tanah terlantar	Produksi (*Qi*)	Hasil produksi perkebunan	Provinsi Dalam Angka 2020, BPS
	Tenaga Kerja (*Li*)	Tenaga kerja subsektor perkebunan suatu kabupaten/kota tahun 2020.	Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2020, Kementan
	Produktivitas (*qi*)	Produksi subsektor perkebunan suatu kabupaten/kota Dibagi tenaga kerja subsektor tersebut.	
	Luas Lahan Perkebunan (*Ai*)	Luasan lahan subsektor Perkebunan suatu kabupaten/kota tahun 2020 (dalam hektar).	Provinsi Dalam Angka 2020, BPS

	Indikasi Tanah Terlantar (*TTi*)	Indikasi luas tanah terlantar Subsektor perkebunan tahun 2020 (dalam hektar)	Basis Data Tanah Indikasi Terlantar 2020, Kem ATR/BPN
	Kepadatan Tenaga Kerja (*Ii*)	Tenaga kerja subsektor perkebunan dibagi luas lahan perkebunan suatu Kabupaten/Kota	
	Potensi Kerugian Ekonomi (*PKEi*)	Potensi kerugian produksi Subsektor perkebunan akibat tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan (juta rupiah)	
	Potensi Penyerapan Tenaga Kerja (*PTKi*)	Potensi penyerapan tenaga kerja subsektor perkebunan dari pemanfaatan tanah terlantar.	
Untuk mengetahui faktor yang menjadi penelantaran tanah	Ketidak Adaan Dana	Ketidak adaan dana/ anggaran dalam proses pembangunan atau pemanfaatan tanah .	Identifikasi Lapangan dan wawancara beberapa pihak terkait yang menangani masalaha tanah terlantar.
	Konflik Antar Pihak	Perubahan bentuk fisik terkait batas kepemilikan atau hal-hal yang dapat merugikan satu pihak terhadap pemanfaatan atau pengelolaan tanah tersebut.	
	Spekulasi Untuk Memperoleh Keuntungan	Tanah dinilai sebagai jaminan investasi karena mampu menghasilkan keuntungan finansial.	
	Perusahaan Bangkrut	Manajemen pengelolaan usaha.	
	Kesalahan Identifikasi Pasar	permintaan dan penawaran pemberian ijin pembangunan terhadap lahan.	
	Ketidaksesuaian Hak Atas Tanah Dengan Rencana Tata Ruang Akibat Perubahan Tata Ruang	ketidaksesuaian hak atas tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menjadikan pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukan lahannya. Perubahan kebijakan terutama kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah disesuaikan dengan kondisi pemanfaatan tanah	

		saat ini.	
	Kesalahan dalam Menganalisis Kelayakan Pemberian Hak Atas Tanah	Teknis pemberian ijin atau hak atas tanah.	
	Ketidaktegasan Waktu Minimum Pembangunan	Efektifitas pemerintah dalam melakukan penertiban tanah terlantar.	
	Belum Membangun karena Politik Pemerintah	Politik pemerintahan yang selalu berubah-ubah.	

Sumber : (*Wibowo, 2020) dan (Wulandari & Pramono, 2020)*

3.6 Populasi dan Sampel

3.6.1 Populasi Penelitian

Wilayah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tiga (3) kabupaten di Pulau Lombok antaranya Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah dan Lombok Utara yang terdapat lokasi tanah terindikasi terlantar.

3.6.2 Sampel dan Teknik Penelitian

Pada penelitian ini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan mengunakan teknik *snowball sampling*, yang dimana dilakukan dengan berdasarkan wawancara atau korespondasi. Metode ini meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya, demikian secara terus menerus sehingga seluruh kebutuhan sampel dapat terpenuhi. Sampel pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah instansi terkait yang menangani masalah tanah terlantar yaitu BPN Provinsi NTB, sehingga dari informasi awal yang didapat mempermudah mencari sampel berikutnya hingga tercapainya tujuan penelitian.

3.7 Metode Analisis Data

3.7.1 Metode identifikasi tanah terlantar

Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis spasial dengan melakukan digitasi data hasil identifikasi dengan basis data tanah terindikasi

terlantar, hal ini dilakukan untuk mengetahui sebaran tanah terindikasi terlantar.

3.7.2 Metode analisis perhitungan kerugian ekonomi pada sektor perkebunan

Metode analisis data yang dilakukan dalam Penelitian ini, menggunakan beberapa asumsi agar hasil penelitian ini dapat diterima secara umum. Asumsi-asumsi yang digunakan antara lain:

1. Objek tanah HGU dan HGB yang terindikasi terlantar dalam analisis peruntukannya adalah untuk tanah perkebunan
2. Data hasil produksi pekebunan terdiri dari banyak komoditas akan tetapi dalam studi ini kami menggunakan total komoditas perkebunan dengan tidak memisahkan komoditas per komoditas
3. Faktor-faktor yang memengaruhi objek tanah menjadi terlantar kami asumsikan nol atau semua faktor tetap (*ceteris paribus*).

Kerugian ekonomi diukur berdasarkan kepadatan output dengan beberapa rumus yang digunakan (*Wibowo, 2020)*, antaranya :

- Produktivitas (q) : Q/L

  Keterangan :

  Q : Hasil Produksi Perkebunan

  L : Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan
- Kepadatan Tenaga Kerja (I) : L/A

  Keterangan :

  L : Jumlah Tenaga Kerja Perkebunan

  A : Luas Lahan Perkebunan
- Rumus perhitungan kerugian ekonomi :

$$PKE_i = (\frac{Q_i}{A_i})TT_i$$

Keterangan :

PKEi : Potensi kerugian ekonomi subsektor perkebunan

Qi : Produksi subsektor perkebunan dalam PDRB perkebunan

Ai : Luas lahan perkebunan

TTi : Luasan indikasi tanah terindikasi terlantar suatu kabupaten/kota.

- Rumus menghitung perkiraan potensi penyerapan tenaga kerja yang akan berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di suatu kota/kabupaten sebagai berikut :

  $PTKi = L'i - Li$

  $= liTTi$

  Keterangan :

  PTKi : Potensi penyerapan tenaga kerja

  L'i - Li : Jumlah tenaga kerja subsektor perkebunan paska dan par-pemanfaatan tanah terlantar (tenaga kerja perkebunan diasumsikan tersebar merata dilahan-tanah perkebunan).

3.7.3 Metode analisi Faktor Penelantaran Tanah

Metode analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk memahami fenomena tentang tanah terlantar. Tidak hanya itu metode analisis yang dilakukan juga dengan melakukan wawancara kepada pihak yang menanganin masalah tanah terlantar atau pihak-pihak yang menjadi sumber penelantaran tanah dengan menyediakan form pertanyaan yang merupakan 9 faktor penelantaran tanah sehingga hal ini nantinya akan memudahkan alur identifikasi.

Data-data deskriptif berupa rangkaian kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dari hasil wawancara, selanjutnya dari data yang diperoleh akan di susun, di sesuaikan dengan keadaan eksisiting maupun data pendukung lainnya yang diperoleh saat pemantauan di lapangan sehingga didapatkan faktor penyebab utama penelantaran tanah.

3.8 Alur Penelitian

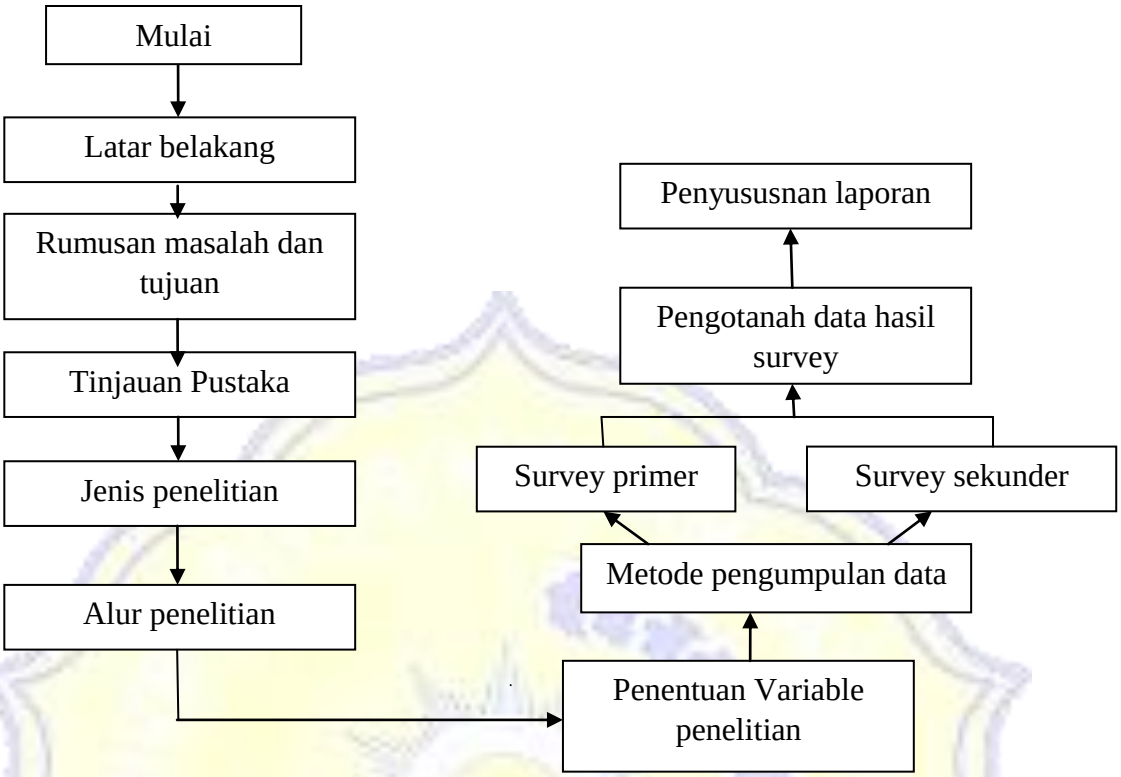

3.9 Desain Survey

Untuk mempermudah dalam penelitian, maka diperlukan desain survei penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengumpulkan data yang diperlukan nantinya. Untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Desain Survei

Dampak Tanah Terlantar Terhadap Potensi Kerugian Ekonomi Pada Sektor Perkebunan Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat (NTB)

No	Tujuan	Variabel	Teori Variabel	Data Yang Diperlukan	Sumber Data	Metode Pengambila Data	Analisis Data	Output
1.	Untuk Mengetahui Lokasi Tanah Terlantar	Lokasi	Kriteria tanah terlantar (supriyanto, 2010)	Peta lokasi tanah terindikasi terlantar dan luas tanah terindifiksi terlantar	Primer dan Sekunder	Pengamatan langsung, basis data pemuktamaran tanah terindifikasi terlantar, referensi lainnya	Digitasi melalui aplikasi Argisc	Lokasi sebaran tanah terlantar dan luas tanah terlantar
		Perizinan						
		Batas Waktu Pemberian Ijin						
		Kepemilikan						
2.	Untuk mengetahui kerugian ekonomi suatu	Produksi	Perhitungan kerugian ekonomi terhadap sektor pertanian	Produksi subsektor perkebunan suatu	Sekunder	Provinsi Dalam Angka 2020, BPS	Teknik perhitungan kerugian ekonomi	Kerugian ekonomi

	kawasan terhadap lahan terlantar		(Wibowo, 2020)	kabupaten/kota tahun 2020 juta rupiah			dengan rumus : $PKE_i = (\frac{Q_i}{A_i})TT_i$	
		Tenaga Kerja		Tenaga kerja subsektor perkebunan suatu kabupaten/kota tahun 2020	Sekunder	Statistik Ketenagakerjaan Sektor Pertanian Tahun 2020, Kementan		
		Produktivitas		Produksi subsektor perkebunan suatu kabupaten/kota Dibagi tenaga kerja subsektor tersebut				
		Luas lahan Perkebunan		Luasan lahan subsektor Perkebunan suatu kabupaten/kota tahun 2020 (dalam hektar)	Sekunder	Provinsi Dalam Angka 2020, BPS		

		Terindiksi Tanah Terlantar		Indikasi luas lahan terlantar Subsektor perkebunan tahun 2020 (dalam hektar)	Sekunder	Basis Data Tanah Indikasi Terlantar 2020, Kem ATR/BPN		
		Kepadatan Tenaga Kerja		Tenaga kerja subsektor perkebunan dibagi luas lahan perkebunan suatu kabupaten/kota				
		Potensi Kerugian Ekonomi		Potensi kerugian produksi Subsektor perkebunan akibat tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan.				
		Potensi Penyerapan Tenaga Kerja		Potensi penyerapan tenaga kerja subsektor perkebunan				

				dari pemanfaatan tanah terlantar				
3.	Untuk mengetahui faktor yang menjadi penelantaran tanah	Ketidak adaan Dana	Faktor penyebab penelantaran tanah (Wulandari & Pramono, 2020)	Kriteria yang mempengaruhi ketidakadaan anggaran	Primer dan Sekunder	Pengamatan langsung, Wawancara, Referensi lainnya	Deskriptif Kualitatif	Faktor penelantaran tanah dan lokasi
		Konflik Antar Pihak		Penyebab konflik	Primer dan Sekunder	Pengamatan langsung, Wawancara, Referensi lainnya		
		Spekulasi Untuk Memperoleh Keuntungan		jaminan investasi	Primer dan Sekunder	Pengamatan langsung, Wawancara, Referensi lainnya		
		Perusahaan Bangkrut		Manajemen pengelolaan usaha	Primer dan Sekunder	Pengamatan langsung, Wawancara, Referensi lainnya		
		Kesalahan Identifikasi Pasar		Data permintaan dan penawaran pemberian ijin pembangunan	Primer dan Sekunder	Pengamatan langsung, Wawancara, Referensi lainnya		

				terhadap tanah				
		Ketidaksesuaian Hak Atas Tanah Dengan Rencana Tata Ruang Akibat Perubahan Tata Ruang		Ketidaksesuaian hak atas tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sehingga menjadikan pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan peruntukan lahannya. Perubahan kebijakan terutama kebijakan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah disesuaikan dengan kondisi pemanfaatan tanah saat ini.	Primer dan Sekunder	Pengamatan langsung, Wawancara, Referensi lainnya		

		Kesalahan dalam Menganalisis Kelayakan Pemberian Hak Atas Tanah		Teknis pemberian ijin atau hak atas tanah	Primer dan Sekunder	Pengamatan langsung, Wawancara, Referensi lainnya		
		Ketidaktegasan Waktu Minimum Pembangunan		Efektifitas waktu identifikasi pemerintah dalam melakukan penertiban tanah terlantar	Primer dan Sekunder	Pengamatan langsung, Wawancara ,Referensi lainnya		

Sumber: Hasil olahan dan Kajian Literatur (2022)